

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 /SEOJK.03/2021
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841), yang selanjutnya disebut POJK RBB, Bank diwajibkan untuk menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun. Selain itu, dengan adanya perkembangan ketentuan perbankan terkini yang antara lain menyebabkan perubahan cakupan, format, dan tata cara pelaporan Rencana Bisnis yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Rencana Bisnis Bank Umum sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Untuk mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, bank umum yang melaksanakan kegiatan secara konvensional, selanjutnya disebut Bank Umum, perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko, dan asas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis, dan komprehensif sehingga mencerminkan kompleksitas bisnis Bank Umum dan adaptabilitas Bank Umum dengan perkembangan terkini sehingga dapat menjadi arah kebijakan serta pengembangan usaha Bank Umum.

2. Agar penyusunan Rencana Bisnis dapat dilakukan secara komprehensif, cakupan Rencana Bisnis bagi Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus mencakup pula Rencana Bisnis bagi UUS sebagai satu kesatuan.
3. Sejalan dengan penyusunan Rencana Bisnis secara komprehensif sebagaimana pada angka 2, Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi Bank Umum yang memiliki UUS juga harus mencakup laporan bagi UUS sebagai satu kesatuan laporan.
4. Bank Umum yang memiliki UUS juga menyusun Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis bagi UUS secara tersendiri dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank umum syariah dan unit usaha syariah.

II. RENCANA BISNIS

Sesuai POJK RBB, Rencana Bisnis paling sedikit mencakup:

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun terakhir, antara lain aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, dana pihak ketiga, dan rasio keuangan. Selain itu, ringkasan eksekutif juga memuat target usaha Bank Umum dalam jangka pendek (1 (satu) tahun) sampai dengan jangka menengah (3 (tiga) tahun).

2. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan dan strategi manajemen untuk 1 (satu) tahun ke depan, yang paling sedikit memuat analisis posisi Bank Umum dalam menghadapi persaingan usaha, kebijakan manajemen (*policy statements*), kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, strategi pengembangan bisnis, strategi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebijakan remunerasi (*remuneration policy*).

3. Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja Bank Umum Saat Ini
Bagian ini berisi penjelasan baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai kondisi Bank Umum pada saat penyusunan Rencana Bisnis dan berfokus pada hal-hal utama yang perlu mendapat perhatian atau permasalahan yang dihadapi serta hasil yang telah dicapai oleh Bank Umum.
4. Proyeksi Laporan Keuangan
Bagian ini memuat informasi mengenai proyeksi keuangan Bank Umum untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud.
5. Proyeksi Rasio-rasio dan Pos-pos Tertentu Lainnya
Bagian ini memuat proyeksi rasio keuangan dan rasio tertentu lainnya untuk 3 (tiga) tahun ke depan.
6. Rencana Pendanaan
Bagian ini mencerminkan rencana penghimpunan dana untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dan strategi Bank Umum untuk merealisasikan rencana pendanaan.
7. Rencana Penanaman Dana
Bagian ini mencerminkan rencana penanaman dana untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi Bank Umum untuk merealisasikan rencana penanaman dana.
8. Rencana Penyertaan Modal
Bagian ini mencerminkan rencana penyertaan modal untuk 3 (tiga) tahun ke depan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.
9. Rencana Permodalan
Bagian ini paling sedikit meliputi proyeksi pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) serta rencana perubahan modal untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

10. Rencana Pengembangan Organisasi dan SDM

Bagian ini menguraikan informasi mengenai struktur organisasi dan kondisi SDM terkini, rencana pengembangan organisasi dan SDM yang sedang berlangsung, maupun rencana pengembangan terkait SDM lainnya paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ke depan.

11. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru merupakan uraian mengenai rencana penyelenggaraan produk bank yang memenuhi definisi produk bank baru sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum serta penyelenggaraan produk bank umum. Bagian ini memuat fokus pengembangan dan hasil analisis dalam penyelenggaraan produk bank baru untuk 1 (satu) tahun ke depan.

12. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor untuk 1 (satu) tahun ke depan. Pengertian jaringan kantor serta cakupan jaringan kantor yang dilaporkan dalam rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum.

13. Informasi Lainnya

Informasi lainnya memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan (jika ada) namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan pada angka 1 sampai dengan angka 12, antara lain langkah-langkah penyelesaian kredit yang bermasalah termasuk Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank Umum, *linkage program*, pengembangan pelayanan Bank Umum, dan/atau informasi lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Cakupan Rencana Bisnis yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan bersifat minimum sehingga Bank Umum dapat memperluas

cakupan tersebut sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan hal-hal sebagaimana pada bagian I.

Penyusunan Rencana Bisnis mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS DAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS

1. Sesuai POJK RBB, Laporan Realisasi Rencana Bisnis disampaikan Bank Umum secara triwulanan, yaitu untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember. Laporan Realisasi Rencana Bisnis paling sedikit mencakup penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis, penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis, rasio keuangan dan pos-pos tertentu, serta informasi lainnya.
2. Sesuai POJK RBB, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang dilaporkan secara semesteran. Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris, Bank Umum harus memiliki mekanisme internal dalam penyusunan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis.

Cakupan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun oleh Dewan Komisaris paling sedikit meliputi penilaian mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Umum secara umum, serta upaya memperbaiki kinerja Bank Umum dalam hal dari hasil penilaian terjadi penurunan kinerja.

Penyusunan Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IV. PELAPORAN

1. Sesuai POJK RBB, Bank Umum menyampaikan Rencana Bisnis atau penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan sebagaimana angka 1 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Tata cara dan batas waktu penyampaian laporan secara daring dilakukan sesuai dengan tata cara dan batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Bank Umum pertama kali menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk posisi data laporan bulan Maret 2021.
2. Bank Umum pertama kali menyampaikan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk posisi data laporan bulan Juni 2021.
3. Bank Umum pertama kali menyampaikan Rencana Bisnis sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini untuk Rencana Bisnis tahun 2022.
4. Dalam hal Bank Umum melakukan penyesuaian dan/atau perubahan atas Rencana Bisnis tahun 2021, Bank Umum menggunakan format sebagaimana yang digunakan dalam penyusunan Rencana Bisnis tahun 2021.
5. Penyesuaian dan/atau perubahan Rencana Bisnis tahun 2021 disampaikan secara luring.

VI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 /SEOJK.03/2021
TENTANG
RENCANA BISNIS BANK UMUM

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA BISNIS, LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS, DAN
LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS BANK UMUM**

DAFTAR ISI

I.	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS	1
1.	Ringkasan Eksekutif.....	1
2.	Kebijakan dan Strategi Manajemen.....	4
3.	Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja Bank Umum Saat Ini...	5
4.	Proyeksi Laporan Keuangan	7
a.	Format Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).....	8
b.	Format Proyeksi Laba Rugi.....	10
c.	Format Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi	13
d.	Format Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan.....	14
5.	Proyeksi Rasio-rasio dan Pos-pos Tertentu Lainnya	15
a.	Format Proyeksi Rasio-rasio dan Pos-pos Tertentu Lainnya..	16
b.	Penjelasan Rasio Keuangan Pokok dan Pos-pos Tertentu	18
6.	Rencana Pendanaan.....	26
a.	Format Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga	27
b.	Format Rencana Penerbitan Surat Berharga	29
c.	Format Rencana Pendanaan Lainnya	30
7.	Rencana Penanaman Dana.....	31
a.	Format Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait	32
b.	Format Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur Inti	33
c.	Format Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu	34
d.	Format Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi	35
e.	Format Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan	37
f.	Format Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Provinsi	38
g.	Format Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi	39
h.	Format Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan	42
i.	Format Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Provinsi.....	43
j.	Format Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Surat Berharga.....	44
k.	Format Rencana Penanaman Dana Lainnya	46

8.	Rencana Penyertaan Modal.....	47
9.	Rencana Permodalan	48
	a. Format Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	49
	b. Format Rencana Perubahan Modal.....	53
10.	Rencana Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)	54
	a. Rencana Pengembangan Organisasi	54
	b. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.....	54
	c. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia	54
	d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing	54
	e. Rencana Penggunaan Tenaga Alih Daya (<i>Outsourcing</i>)	55
11.	Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru.....	56
12.	Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor .	58
13.	Informasi Lainnya	59
II.	PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS ...	60
	1. Format Informasi Realisasi Rencana Bisnis dan Tindak Lanjut....	61
	2. Format Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu	62
	3. Format Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor	64
	4. Format Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan kepada Tenaga Pendamping	65
	5. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Alih Pengetahuan oleh Tenaga Kerja Asing	65
III.	PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS.....	66

I. PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS

Rencana Bisnis paling sedikit mencakup:

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini berisi penjelasan umum, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai hasil yang telah dicapai pada tahun terakhir, antara lain aspek permodalan, rentabilitas, penilaian risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, dana pihak ketiga, dan rasio keuangan. Selain itu ringkasan eksekutif juga memuat target usaha Bank Umum dalam jangka pendek (1 (satu) tahun) sampai dengan jangka menengah (3 (tiga) tahun). Ringkasan eksekutif disusun sesuai dengan format yang ditetapkan dan paling sedikit mencakup:

a. Visi dan Misi Bank Umum

Bagian ini menguraikan visi dan misi yang menjadi tujuan Bank Umum yang selaras dengan rencana strategis jangka panjang Bank Umum.

b. Arah Kebijakan Bank Umum

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan Bank Umum baik jangka pendek maupun jangka menengah, yang diselaraskan dengan rencana strategis jangka panjang Bank Umum.

c. Langkah-langkah Strategis yang Akan Ditempuh Bank Umum

Bagian ini memberikan uraian mengenai langkah-langkah strategis yang akan ditempuh Bank Umum untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan Bank Umum ke depan.

d. Indikator Keuangan Utama

Bagian ini antara lain memuat posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) maupun proyeksi. Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis sebagai berikut.

T merupakan tahun pelaksanaan Rencana Bisnis. Sebagai contoh, untuk Rencana Bisnis yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, Bank Umum menyampaikan data aktual posisi bulan September 2021 (T-1), data proyeksi posisi bulan Desember 2021 (T-1), data proyeksi tahun 2022 (T) secara triwulanan yaitu untuk posisi bulan Maret 2022, bulan Juni 2022, bulan September 2022, bulan Desember 2022, serta data proyeksi tahun 2023 (T+1) dan tahun 2024 (T+2) secara tahunan yaitu untuk posisi bulan Desember 2023 dan Desember 2024.

e. Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Bagian ini menguraikan target atau fokus kegiatan usaha Bank Umum baik kuantitatif maupun kualitatif dalam jangka pendek maupun jangka menengah, sesuai dengan visi dan misi Bank Umum disertai dengan alasan pemilihan target, asumsi yang digunakan, dan strategi untuk mencapai target.

Target jangka pendek, misalnya berupa target penurunan tingkat NPL, peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi. Target jangka menengah, misalnya target pengembangan kegiatan usaha berbasis syariah, target pengembangan layanan perbankan digital, dan target penerapan tata kelola.

2. Kebijakan dan Strategi Manajemen

Bagian ini berisi penjelasan mengenai kebijakan dan strategi manajemen untuk 1 (satu) tahun ke depan, yang paling sedikit memuat:

- a. analisis posisi Bank Umum dalam menghadapi persaingan usaha, meliputi informasi mengenai posisi Bank Umum baik dalam kelompok usaha yang sama maupun secara industri, termasuk informasi mengenai permasalahan dan hambatan yang dialami Bank Umum. Dalam melakukan analisis posisi, Bank Umum menggunakan pendekatan tertentu, paling sedikit berupa analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman;
- b. kebijakan manajemen (*policy statements*), meliputi informasi umum kebijakan Bank Umum yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha Bank Umum pada

waktu yang akan datang, antara lain rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi Bank Umum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum;

- c. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko yang disusun berdasarkan evaluasi atas profil risiko Bank Umum dan upaya-upaya perbaikan yang akan ditempuh serta penjelasan mengenai kebijakan dalam melaksanakan fungsi kepatuhan;
- d. strategi pengembangan bisnis, antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha Bank Umum yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi sistem informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal; dan
- e. strategi pengembangan SDM dan kebijakan remunerasi (*remuneration policy*), paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus, dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Bank Umum, termasuk kepada pegawai.

3. Penerapan Manajemen Risiko dan Kinerja Bank Umum Saat Ini
Bagian ini berisi penjelasan baik kuantitatif maupun kualitatif, mengenai kondisi Bank Umum pada saat penyusunan Rencana Bisnis dan berfokus pada hal-hal utama yang perlu mendapat perhatian atau permasalahan yang dihadapi serta hasil yang telah dicapai Bank Umum.

Bagian ini paling sedikit memuat uraian mengenai:

- a. Penerapan Manajemen Risiko, termasuk profil risiko untuk seluruh risiko

Uraian mengenai penerapan manajemen risiko meliputi evaluasi dan hasil penerapan manajemen risiko untuk periode awal tahun sampai dengan posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis.

Uraian mengenai penilaian profil risiko meliputi informasi penilaian Bank Umum mengenai tingkat dan tren untuk seluruh risiko.

Tata cara penyusunan profil risiko dan evaluasi penerapan manajemen risiko berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Dalam uraian ini termasuk pula evaluasi mengenai efektivitas dan hasil penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta rencana kerja kepatuhan untuk 1 (satu) tahun ke depan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum.

b. Penerapan Tata Kelola

Uraian mengenai penilaian penerapan tata kelola berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.

c. Kinerja Keuangan, khususnya Permodalan (*Capital*) dan Rentabilitas (*Earnings*)

Uraian mengenai kinerja keuangan Bank Umum termasuk hasil pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) untuk memperbaiki kinerja Bank Umum (jika ada) sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum.

Uraian mengenai kinerja permodalan mencakup kecukupan dan komposisi permodalan Bank Umum, serta kemampuan permodalan dalam mengantisipasi risiko terhadap aset bermasalah, kemampuan Bank Umum untuk menambah modal dari laba operasional, kemampuan permodalan Bank Umum untuk mendukung pertumbuhan usaha, akses kepada sumber permodalan, dan kemampuan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan Bank Umum.

Uraian mengenai kinerja rentabilitas Bank Umum mencakup antara lain pencapaian ROA, *Return on Equity* (ROE), NIM, perkembangan dan prospek laba operasional, rasio BOPO, dan

rasio beban operasional selain bunga terhadap pendapatan kegiatan utama.

d. Realisasi Pemberian Kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Uraian mengenai realisasi pemberian kredit mencerminkan peranan Bank Umum dalam mendukung perkembangan UMKM.

Pengelompokan UMKM mengacu pada kriteria usaha berdasarkan Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

e. Penerapan Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Uraian mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah hanya diberlakukan bagi Bank Umum yang memiliki UUS.

4. Proyeksi Laporan Keuangan

Bagian ini memuat informasi mengenai kondisi keuangan Bank Umum posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi tahun pertama disusun secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan tahun ketiga disusun secara tahunan (posisi akhir tahun).

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi makro dan mikro yang digunakan dalam menyusun proyeksi keuangan dimaksud.

Asumsi makro antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, sedangkan asumsi mikro antara lain tingkat persaingan antarbank, pertumbuhan kredit industri perbankan, serta tingkat bunga kredit dan simpanan yang digunakan dalam menyusun Rencana Bisnis.

Proyeksi laporan keuangan yang disusun meliputi:

- a. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- b. Proyeksi Laba Rugi;
- c. Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi; dan
- d. Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan.

Penyusunan proyeksi laporan keuangan mengacu pada format berikut.

a. Format Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

(dalam jutaan rupiah)

No	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sep	Des		
ASET									
1.	Kas								
2.	Penempatan pada Bank Indonesia								
3.	Penempatan pada Bank Lain								
4.	Tagihan Spot dan Derivatif/ <i>Forward</i>								
5.	Surat Berharga yang dimiliki								
6.	Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>Repo</i>)								
7.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>Reverse Repo</i>)								
8.	Tagihan Akseptasi								
9.	Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan								
	a Kredit								
	b Pembiayaan Syariah ¹⁾								
	1) Piutang								
	a) Piutang Murabahah								
	b) Pendapatan Margin Murabahah yang Ditangguhkan -/-								
	c) Piutang Istishna'								
	d) Pendapatan Margin Istishna yang Ditangguhkan -/-								
	e) Piutang Qardh								
	f) Piutang Sewa								
	g) Piutang Multijasa								
	h) Pendapatan Margin Multijasa yang Ditangguhkan -/-								
	2) Pembiayaan Bagi Hasil								
	a) Mudharabah								
	b) Musyarakah								
	c) Lainnya								
	3) Pembiayaan Sewa								
	a) Aset Ijarah								
	b) Akumulasi Penyusutan/Amortisasi -/-								
	c) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-								
10.	Penyertaan Modal								
11.	Aset Keuangan Lainnya								
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-								
	a Surat Berharga yang dimiliki								
	b Kredit/Piutang/Pembiayaan yang diberikan								
	1) Kredit								
	2) Piutang/Pembiayaan yang diberikan ¹⁾								
	a) Piutang Murabahah								
	b) Piutang Istishna'								
	c) Piutang Qardh								
	d) Piutang Sewa								
	e) Piutang Multijasa								
	f) Pembiayaan Mudharabah								
	g) Pembiayaan Musyarakah								
	h) Pembiayaan Bagi Hasil Lainnya								
	c Aset Keuangan lainnya								
13.	Aset Tidak Berwujud								
14.	Akumulasi Amortisasi -/-								
15.	Aset Tetap dan Inventaris								
16.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris -/-								
17.	Properti Terbengkalai								
18.	Agunan yang diambil alih								
19.	Rekening tunda								
20.	Aset Antar Kantor								
	a Melakukan kegiatan operasional di Indonesia								
	b Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia								
21.	Salam ¹⁾								
22.	Aset Istishna' dalam Penyelesaian ¹⁾								
23.	Termin Istishna' -/- ¹⁾								
24.	Persediaan ¹⁾								
25.	Aset Lainnya								
	TOTAL ASET								

No	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sep	Des		
LIABILITAS DAN EKUITAS									
1.	Giro								
	a Giro Berdasarkan Prinsip Konvensional								
	b Giro Berdasarkan Prinsip Syariah ¹⁾								
	1) Akad Wadiah								
	2) Akad mudharabah - non profit sharing								
	3) Akad mudharabah - profit sharing								
2.	Tabungan								
	a Tabungan Berdasarkan Prinsip Konvensional								
	b Tabungan Berdasarkan Prinsip Syariah ¹⁾								
	1) Akad Wadiah								
	2) Akad mudharabah - non profit sharing								
	3) Akad mudharabah - profit sharing								
3.	Deposito								
	a Deposito Berdasarkan Prinsip Konvensional								
	b Deposito Berdasarkan Prinsip Syariah ¹⁾								
	1) Akad mudharabah - non profit sharing								
	2) Akad mudharabah - profit sharing								
4.	Uang Elektronik								
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia								
6.	Liabilitas kepada Bank lain								
7.	Liabilitas Spot dan Derivatif/ Forward								
8.	Liabilitas atas Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo)								
9.	Liabilitas Akseptasi								
10.	Surat berharga yang diterbitkan								
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima								
12.	Setoran jaminan								
13.	Liabilitas Antar Kantor								
	a Melakukan kegiatan operasional di Indonesia								
	b Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia								
14.	Liabilitas lainnya								
15.	Modal disetor								
	a Modal dasar								
	b Modal yang belum disetor -/-								
	c Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-								
16.	Tambahan modal disetor								
	a Agio								
	b Disagio -/-								
	c Modal Sumbangan								
	d Waran yang diterbitkan								
	e Opsi saham								
	f Dana setoran modal								
	g Lainnya								
	1) Keuntungan								
	2) Kerugian -/-								
17.	Penghasilan Komprehensif Lain								
	a Keuntungan								
	b Kerugian -/-								
18.	Cadangan								
	a Umum								
	b Tujuan								
19.	Laba/rugi								
	a Tahun-tahun lalu								
	1) Laba								
	2) Rugi -/-								
	b Tahun berjalan								
	1) Laba								
	2) Rugi -/-								
	c Dividen yang dibayarkan -/-								
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS								

Keterangan :

Tata cara pengisian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

1) Diisi bagi Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

b. Format Proyeksi Laba Rugi

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sep	Des		
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL									
A. PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA / IMBAL HASIL									
1.	Pendapatan Bunga / Imbal Hasil								
	a. Pendapatan Bunga / Imbal Hasil Rupiah								
	1) Penempatan pada Bank Indonesia								
	2) Penempatan pada Bank Lain								
	3) Surat Berharga yang Dimiliki								
	4) Kredit/Piutang/Pembiayaan yang Diberikan								
	5) Lainnya								
	b. Pendapatan Bunga / Imbal Hasil Valuta Asing								
	1) Penempatan pada Bank Indonesia								
	2) Penempatan pada Bank Lain								
	3) Surat Berharga yang Dimiliki								
	4) Kredit/Piutang/Pembiayaan yang Diberikan								
	5) Lainnya								
2.	Beban Bunga / Imbal Hasil								
	a. Beban Bunga / Imbal Hasil Rupiah								
	1) Liabilitas pada Bank Indonesia								
	2) Liabilitas pada Bank Lain								
	3) Dana Pihak Ketiga Bukan Bank								
	4) Surat Berharga yang Diterbitkan								
	5) Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima								
	6) Lainnya								
	b. Beban Bunga / Imbal Hasil Valuta Asing								
	1) Liabilitas pada Bank Indonesia								
	2) Liabilitas pada Bank Lain								
	3) Dana Pihak Ketiga Bukan Bank								
	4) Surat Berharga yang Diterbitkan								
	5) Pinjaman/Pembiayaan yang Diterima								
	6) Lainnya								
3.	Pendapatan Operasional Bunga / Imbal Hasil Bersih								
4.	Beban Operasional Bunga / Imbal Hasil Bersih								
B. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL LAINNYA									
1.	Pendapatan Operasional Lainnya								
	a. Peningkatan Nilai Wajar Aset Keuangan								
	1) Surat Berharga								
	2) Kredit								
	3) Spot dan Derivatif/ <i>Forward</i>								
	4) Aset Keuangan Lainnya								
	b. Penurunan Nilai Wajar Liabilitas Keuangan								
	1) Surat Berharga								
	2) Transaksi Spot dan <i>Forward</i>								
	c. Keuntungan Penjualan Aset Keuangan								
	1) Surat Berharga								
	2) Kredit								
	3) Keuntungan Pelepasan Aset Ijarah ¹⁾								
	4) Aset Keuangan Lainnya								
	d. Keuntungan Transaksi Spot dan Derivatif (<i>Realised</i>)								
	Keuntungan transaksi Spot dan <i>Forward</i> (<i>Realised</i>) ¹⁾								
	e. Dividen								

No.	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sep	Des		
9.	Laba Non Operasional								
10.	Rugi Non Operasional -/-								
11.	Laba Tahun Berjalan Sebelum Pajak								
12.	Rugi Tahun Berjalan Sebelum Pajak								
13.	Penerimaan Transfer Laba								
14.	Penerimaan Transfer Rugi								
15.	Transfer Laba ke Kantor Pusat								
16.	Transfer Rugi ke Kantor Pusat								
17.	Taksiran Pajak Tahun Berjalan -/-								
18.	Pendapatan Pajak Tangguhan								
19.	Beban Pajak Tangguhan -/-								
20.	Laba Bersih Tahun Berjalan								
21.	Rugi Bersih Tahun Berjalan								

Keterangan :

Tata cara pengisian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

- 1) Diisi bagi Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

c. Format Proyeksi Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	Aktual Sept T-1	Proyeksi						Des T+1	Des T+2	
			Des T-1	T				Des T+1			Des T+2
				Mar	Jun	Sep	Des				
A. TAGIHAN KOMITMEN											
1.	Fasilitas Pinjaman/Pembiayaan yang Belum Ditarik										
	a. Rupiah										
	b. Valuta Asing										
2.	Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>										
3.	Lainnya										
B. KEWAJIBAN KOMITMEN											
1.	Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik										
	a. <i>Committed</i>										
	1) Rupiah										
	2) Valuta Asing										
	b. <i>Uncommitted</i>										
	1) Rupiah										
	2) Valuta Asing										
2.	<i>Irrevocable</i> L/C yang masih berjalan										
	a. L/C luar negeri										
	b. L/C dalam negeri										
3.	Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/ <i>forward</i>										
4.	Lainnya										
C. TAGIHAN KONTINJENSI											
1.	Garansi yang diterima										
	a. Rupiah										
	b. Valuta Asing										
2.	Pendapatan dalam penyelesaian ¹⁾										
3.	Lainnya										
D. KEWAJIBAN KONTINJENSI											
1.	Garansi yang diberikan										
	a. Rupiah										
	b. Valuta Asing										
2.	Lainnya										
E. LAINNYA											
1.	Penerusan Kredit/penerusan dana (<i>channeling</i>)										
2.	Aset Keuangan yang dihapusbuku										
	a. Aset Keuangan										
	1) Kredit/Pembiayaan yang diberikan										
	2) Lainnya										
	b. Aset Keuangan dihapusbuku yang dipulihkan atau berhasil ditagih										
	1) Kredit/Pembiayaan yang diberikan										
	2) Lainnya										
	c. Aset Keuangan yang dihapustagih ¹⁾										
	1) Terkait dengan Bank										
	2) Tidak terkait dengan Bank										
3.	Kredit/Pembiayaan alihan dengan pengelolaan penagihan										

Keterangan:

Tata cara pengisian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

1) Diisi bagi Bank Umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

d. Format Asumsi Makro dan Mikro yang Digunakan

No.	Asumsi ¹⁾	Proyeksi					
		T ²⁾				Des T+1	Des T+2
		Mar	Jun	Sep	Des		
ASUMSI MAKRO							
1.	Pertumbuhan PDB (%)						
2.	Inflasi (%)						
3.	Kurs IDR/USD						
4.	BI 7 Days Rate						
ASUMSI MIKRO							
1.	Pertumbuhan Kredit (%)						
2.	Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (%)						
3.	Tingkat Bunga Simpanan Tabungan (%)						
4.	Tingkat Bunga Kredit Ritel Komersial (%)						

Keterangan :

- 1) Asumsi lainnya seperti nilai tukar, pertumbuhan ekspor, pertumbuhan impor dan pangsa Bank Umum terhadap industri dilampirkan pada bagian terpisah.
- 2) Dalam hal tidak tersedia asumsi per triwulan, dapat menggunakan asumsi per tahun.

5. Proyeksi Rasio-rasio dan Pos-pos Tertentu Lainnya

Bagian ini memuat rasio keuangan dan rasio tertentu lainnya posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan proyeksi untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan, sebagai berikut:

a. Rasio Keuangan Pokok

Proyeksi rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling sedikit dapat memberikan informasi penilaian atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.

b. Pos-pos Tertentu Lainnya

Proyeksi pos-pos tertentu lainnya meliputi proyeksi beberapa rasio terkait kredit kepada UMKM, rasio dana pendidikan, dan rasio aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank Umum terhadap modal.

Selain itu dicantumkan pula pos-pos tertentu yang memberikan informasi mengenai penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Proyeksi ini disusun dengan mengacu pada format berikut.

No.	Rasio-Rasio	Aktual Sept T-1	Proyeksi						Des T+1	Des T+2
			Des T-1	T						
				Mar	Jun	Sep	Des			
B. RASIO-RASIO TERTENTU LAINNYA										
1.	Rasio Total Kredit kepada Usaha Mikro terhadap Total Kredit kepada UMKM									
2.	Rasio Total Kredit kepada Usaha Kecil terhadap Total Kredit kepada UMKM									
3.	Rasio Total Kredit kepada Usaha Menengah terhadap Total Kredit kepada UMKM									
4.	Rasio Total Kredit kepada UMKM terhadap Total Kredit									
5.	a Rasio Dana Pendidikan dan Latihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran SDM ³⁾									
	b Rasio Sisa Anggaran Tahun ini yang Digunakan untuk Tahun Berikutnya ⁴⁾									
6.	Rasio Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Bank terhadap Modal									
7.	Rasio Beban <i>Overhead</i> terhadap Total Aset ²⁾									
8.	Rasio Beban <i>Overhead</i> terhadap Pendapatan Operasional ²⁾									

Keterangan:

- 1) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.
- 2) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman kepada penjelasan rasio keuangan pokok dan pos-pos tertentu sebagaimana butir I.5.b.
- 3) Cakupan dana pendidikan dan latihan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia bank umum.
- 4) Yang dimaksud dengan sisa anggaran adalah selisih antara dana yang wajib disediakan dengan realisasinya.
- 5) Hanya diisi bagi Bank Umum selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

b. Penjelasan Rasio Keuangan Pokok dan Pos-pos Tertentu

NO	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
RASIO KEUANGAN			
1.	Rasio Modal Inti terhadap ATMR	$\frac{\text{Modal Inti}}{\text{Total ATMR}}$	<p>* Perhitungan Modal Inti</p> <p>a. Bagi Bank Umum selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.</p> <p>b. Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.</p> <p>* Total ATMR meliputi ATMR untuk Risiko Kredit, ATMR untuk Risiko Operasional dan ATMR untuk Risiko Pasar.</p>
2.	Rasio Modal Inti terhadap Total Aset	$\frac{\text{Modal Inti}}{\text{Total Aset}}$	<p>* Perhitungan Modal Inti sesuai penjelasan pada angka 1.</p> <p>* Total Aset meliputi total aset yang tercatat di</p>

NO	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			Laporan Posisi Keuangan (neraca).
3.	Rasio Beban <i>Overhead</i> terhadap Pendapatan Bersih Kegiatan Utama	$\frac{\text{Beban } \textit{Overhead}}{\text{Pendapatan Bersih Kegiatan Utama}}$	<p>* Beban <i>Overhead</i> meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusutan/amortisasi b. Biaya tenaga kerja c. Pendidikan & pelatihan d. Premi asuransi e. Kerugian terkait risiko operasional f. Penelitian dan pengembangan g. Sewa h. Promosi i. Pajak-pajak, tidak termasuk pajak penghasilan j. Pemeliharaan dan perbaikan k. Barang dan jasa l. Lainnya <p>* Pendapatan Bersih Kegiatan Utama meliputi pendapatan bunga bersih ditambah dengan pendapatan <i>fee</i> bersih.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pendapatan bunga bersih adalah seluruh pendapatan bunga dikurangi seluruh beban bunga. b. Pendapatan <i>fee</i> bersih adalah seluruh pendapatan komisi/provisi/<i>fee</i>

NO	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			dikurangi seluruh beban komisi/provisi/fee yang berasal dari kegiatan kredit, transaksi derivatif, kredit kelolaan, dan lainnya.
4.	Rasio <i>Fee Based Income</i> terhadap Total Pendapatan Operasional	$\frac{\text{Fee Based Income}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$	<p>* <i>Fee Based Income</i> meliputi pendapatan komisi/provisi/fee yang berasal dari kegiatan kredit, transaksi derivatif, kredit kelolaan, dan lainnya.</p> <p>* Total Pendapatan Operasional meliputi pendapatan bunga dan pendapatan operasional selain bunga.</p>
5.	Rasio CKPN Aset Produktif terhadap Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) yang Wajib Dihitung Atas Aset Produktif ¹⁾	$\frac{\text{CKPN Aset Produktif (termasuk TRA)}}{\text{PPKA yang Wajib Dihitung}}$	<p>* CKPN adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.</p> <p>* Perhitungan PPKA mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.</p> <p>Keterangan: ¹⁾ untuk Laporan Realisasi Rencana Bisnis sepanjang</p>

NO	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			tahun 2021 menggunakan rasio berikut: $\frac{\text{CKPN Aset Produktif} + \text{PPKA TRA}}{\text{PPKA yang wajib dihitung}}$
6.	Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif	$\frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total Aset Produktif}}$	* Total Kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank. * Total Aset Produktif adalah kredit, surat berharga, penyertaan dan tagihan lainnya yang tercantum dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca), baik kepada pihak ketiga bukan bank maupun kepada bank, termasuk kepada Bank Indonesia.
7.	Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit	$\frac{\text{Kredit kepada Debitur Inti}}{\text{Total Kredit}}$	* Kredit kepada Debitur Inti meliputi kredit kepada debitur atau grup di luar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut: a. bagi Bank Umum yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun meliputi kredit kepada 10 (sepuluh) debitur atau grup terbesar; b. bagi Bank Umum yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil atau

NO	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>sama dengan Rp10 triliun meliputi kredit kepada 15 (lima belas) debitur atau grup terbesar;</p> <p>c. bagi Bank Umum yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10 triliun meliputi kredit kepada 25 (dua puluh lima) debitur atau grup terbesar.</p> <p>* Total Kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank.</p>
8.	Rasio Aset yang Diukur Pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi terhadap Total Aset	$\frac{\text{Aset yang diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi}}{\text{Total Aset}}$	<p>* Aset yang diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi meliputi seluruh aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai standar akuntansi keuangan mengenai instrumen keuangan.</p> <p>* Total Aset meliputi total aset yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (neraca).</p>
9.	Rasio Spot dan Derivatif terhadap Total Aset	$\frac{\text{Tagihan Spot dan Derivatif}}{\text{Total Aset}}$	<p>* Tagihan Spot dan Derivatif meliputi seluruh tagihan spot dan derivatif yang dikelompokkan sebagai posisi <i>trading book</i> baik</p>

NO	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>untuk tujuan <i>trading</i> maupun <i>hedging</i>.</p> <p>* Total Aset meliputi total aset yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (neraca).</p>
10.	Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset	$\frac{\text{Aset Likuid Primer} + \text{Aset Likuid Sekunder}}{\text{Total Aset}}$	<p>* Aset Likuid Primer meliputi kas, penempatan pada Bank Indonesia (FTO, FASBI), SBI yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan biaya perolehan diamortisasi, serta seluruh surat berharga pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan memiliki sisa jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang.</p> <p>* Aset Likuid Sekunder meliputi:</p> <p>a. surat berharga Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan memiliki sisa jangka waktu antara > 1 (satu)</p>

NO	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
			<p>tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;</p> <p>b. surat berharga Pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan memiliki sisa jangka waktu ≤ 1 (satu) tahun;</p> <p>c. surat berharga Pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan memiliki sisa jangka waktu > 5 (lima) tahun, dengan <i>haircut</i> 25% dari nilai pasar.</p> <p>* Total aset meliputi total aset yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (neraca).</p>
11.	Rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek	$\frac{\text{Aset Likuid Primer} + \text{Aset Likuid Sekunder}}{\text{Pendanaan Jangka Pendek (Short Term Funding)}}$	<p>* Aset Likuid Primer dan Sekunder sesuai penjelasan pada angka 10.</p> <p>* Pendanaan Jangka Pendek meliputi giro, tabungan, deposito dengan sisa jangka waktu ≤ 1 (satu) tahun.</p>
12.	Rasio Deposan Inti terhadap	$\frac{\text{Deposan Inti}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$	<p>* Deposan Inti mencakup 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima), atau 50 (lima puluh) deposan terbesar dari total</p>

NO	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	Total Dana Pihak Ketiga		<p>simpanan, berupa giro, tabungan, dan deposito, dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. bagi Bank Umum yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun, meliputi 10 (sepuluh) depositan terbesar;</p> <p>b. bagi Bank Umum yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp10 triliun meliputi 25 (dua puluh lima) depositan terbesar; dan</p> <p>c. bagi Bank Umum yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10 triliun meliputi 50 (lima puluh) depositan terbesar.</p> <p>* Dana Pihak Ketiga (DPK) meliputi giro, tabungan dan deposito.</p>
13	Rasio Beban <i>Overhead</i> terhadap Total Aset	$\frac{\text{Beban } \textit{Overhead}}{\text{Total Aset}}$	<p>* Beban <i>Overhead</i> sesuai penjelasan pada angka 3.</p> <p>* Total Aset meliputi total aset yang tercatat di Laporan Posisi Keuangan (neraca).</p>
14	Rasio Beban <i>Overhead</i>	$\frac{\text{Beban } \textit{Overhead}}{\text{Total Aset}}$	<p>* Beban <i>Overhead</i> sesuai penjelasan pada angka 3.</p>

NO	RASIO	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
	terhadap Pendapatan Operasional	Pendapatan Operasional	* Total pendapatan operasional meliputi pendapatan bunga dan pendapatan operasional selain bunga.

6. Rencana Pendanaan

Bagian ini mencerminkan posisi penghimpunan dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi tahun pertama disusun secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan tahun ketiga disusun secara tahunan (posisi akhir tahun).

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana serta strategi Bank Umum untuk merealisasikan rencana pendanaan.

Rencana pendanaan yang disusun meliputi:

- a. Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga;
- b. Rencana Penerbitan Surat Berharga; dan
- c. Rencana Pendanaan Lainnya.

Rencana pendanaan disusun dengan mengacu pada format berikut.

a. Format Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga

(dalam jutaan rupiah)

Kelompok	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
GIRO								
A. Pihak Terkait								
1. Rupiah								
2. Valuta Asing								
B. Pihak Tidak Terkait								
1. Rupiah								
2. Valuta Asing								
TOTAL GIRO ¹⁾								
TABUNGAN								
A. Pihak Terkait								
1. Rupiah								
2. Valuta Asing								
B. Pihak Tidak Terkait								
1. Rupiah								
2. Valuta Asing								
TOTAL TABUNGAN ²⁾								
DEPOSITO								
A. RUPIAH								
1. 1 bulan								
2. 3 bulan								
3. 6 bulan								
4. ≥ 12 bulan								
B. VALUTA ASING								
1. 1 bulan								
2. 3 bulan								
3. 6 bulan								
4. ≥ 12 bulan								
TOTAL DEPOSITO ³⁾								
TOTAL DPK RUPIAH								
TOTAL DPK VALAS								
TOTAL PENGHIMPUNAN DPK								
TOTAL DEPOSAN INTI⁴⁾								
% DEPOSAN INTI TERHADAP DPK								

Keterangan:

- 1) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Giro pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- 2) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Tabungan pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- 3) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Deposito pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).
- 4) Deposan inti mencakup 10 (sepuluh), 25 (dua puluh lima) atau 50 (lima puluh) deposan terbesar dari total simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. bagi Bank Umum yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun, meliputi 10 (sepuluh) deposan terbesar;

- b. bagi Bank Umum yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp10 triliun meliputi 25 (dua puluh lima) deposito terbesar; dan
- c. bagi Bank Umum yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10 triliun meliputi 50 (lima puluh) deposito terbesar.

b. Format Rencana Penerbitan Surat Berharga

(dalam jutaan rupiah)

Jenis	Aktual Sept T-1	Proyeksi						Des T+1	Des T+2
		Des T-1	T						
			Mar	Jun	Sep	Des			
RUPIAH									
1. Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA)									
2. Promes/Aksep									
3. Surat Berharga Komersial									
4. <i>Medium Term Notes</i> (MTN)									
5. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah									
6. <i>Floating Rate Notes</i> (FRN)									
7. <i>Credit Linked Notes</i>									
8. Obligasi Korporasi - Subordinasi									
9. Obligasi Korporasi - Non Subordinasi									
10. Sukuk Korporasi - Subordinasi									
11. Sukuk Korporasi - Non Subordinasi									
12. Efek Beragun Aset									
13. Efek Beragun Aset Syariah									
14. Surat Berharga Lainnya									
Total Surat Berharga Rupiah yang Diterbitkan									
VALUTA ASING									
1. Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA)									
2. Promes/Aksep									
3. Surat Berharga Komersial									
4. <i>Medium Term Notes</i> (MTN)									
5. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah									
6. <i>Floating Rate Notes</i> (FRN)									
7. <i>Credit Linked Notes</i>									
8. Obligasi Korporasi - Subordinasi									
9. Obligasi Korporasi - Non Subordinasi									
10. Sukuk Korporasi - Subordinasi									
11. Sukuk Korporasi - Non Subordinasi									
12. Efek Beragun Aset									
13. Efek Beragun Aset Syariah									
14. Surat Berharga Lainnya									
Total Surat Berharga Valuta Asing yang Diterbitkan									
TOTAL SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN ¹⁾									

Keterangan:

- 1) Total pada baris ini harus sesuai dengan total Surat Berharga yang Diterbitkan pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

c. Format Rencana Pendanaan Lainnya

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Pendanaan Lain ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
PINJAMAN YANG DITERIMA								
1. Pinjaman Bank								
2. Pinjaman Luar Negeri								
3. Lainnya ²⁾								
Total Pinjaman yang Diterima								

Keterangan:

- 1) Jenis pendanaan lainnya merupakan pendanaan selain dalam bentuk penghimpunan dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) dan penerbitan surat berharga.
- 2) Jenis pendanaan lainnya dapat dilampirkan pada bagian terpisah.

7. Rencana Penanaman Dana

Bagian ini mencerminkan posisi penanaman dana posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penyaluran dana untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan.

Proyeksi tahun pertama disusun secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan tahun ketiga disusun secara tahunan (posisi akhir tahun).

Rencana penanaman dana antara lain memberikan informasi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait, dan rincian rencana pemberian kredit, termasuk rencana pemberian kredit kepada kegiatan usaha tertentu. Jenis kegiatan usaha tertentu yang dicantumkan dalam rincian pemberian kredit mencerminkan fokus pemberian kredit Bank Umum berdasarkan jenis kegiatan usaha yang diprioritaskan, dan/atau signifikansi pangsa kredit maupun jumlah debitur.

Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai asumsi yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi Bank Umum untuk merealisasikan rencana penanaman dana.

Rencana penanaman dana yang dilaporkan meliputi:

- a. Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait;
- b. Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur Inti;
- c. Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu;
- d. Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi;
- e. Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan;
- f. Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Provinsi;
- g. Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi;
- h. Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan;
- i. Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Provinsi;
- j. Rencana Penanaman Dana dalam bentuk Surat Berharga; dan
- k. Rencana Penanaman Dana Lainnya.

Rencana penanaman dana ini disajikan dengan mengacu pada format berikut.

a. Format Rencana Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

(dalam jutaan rupiah)

Nama Pihak Terkait ¹⁾	Jenis Penyediaan Dana ²⁾	Customers Information File (CIF)	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
				Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
					Mar	Jun	Sep	Des		
Jumlah										
% Penyediaan Dana Pihak Terkait terhadap Modal										

Keterangan:

- 1) Diisi dengan nama-nama pihak terkait.
Pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.
- 2) Jenis penyediaan dana dikelompokkan antara lain menjadi Kredit, Penyertaan, dan Lainnya.

b. Format Rencana Pemberian Kredit kepada Debitur Inti

(dalam jutaan rupiah)

Nama Peminjam/ Kelompok Peminjam	Jenis Peminjam (Grup/ Individu)	Customers Information File (CIF) ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
				Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
					Mar	Jun	Sep	Des		
Jumlah										

Keterangan:

- 1) Dalam hal jenis peminjam merupakan grup, diisi dengan CIF debitur terbesar pada grup tersebut.

Cakupan debitur inti meliputi debitur/grup di luar pihak terkait dengan kriteria sebagai berikut:

- a. bagi Bank Umum yang memiliki total aset kurang dari atau sama dengan Rp1 triliun meliputi 10 (sepuluh) debitur/grup terbesar;
- b. bagi Bank Umum yang memiliki total aset lebih besar dari Rp1 triliun namun lebih kecil atau sama dengan Rp10 triliun meliputi 15 (lima belas) debitur/grup terbesar; dan
- c. bagi Bank Umum yang memiliki total aset lebih besar dari Rp10 triliun meliputi 25 (dua puluh lima) debitur/grup terbesar.

c. Format Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Kegiatan Usaha Tertentu

(dalam jutaan rupiah)

Kegiatan Usaha	Aktual Sept T-1	Proyeksi						Des T+1	Des T+2
		Des T-1	T						
			Mar	Jun	Sep	Des			
1. Pembiayaan Kendaraan Bermotor									
2. Kartu Kredit									
3. Perusahaan Sekuritas									
4. Perusahaan Pembiayaan									
5. Lainnya ¹⁾									
Jumlah²⁾									

Keterangan:

- 1) Diisi dengan total rencana pemberian kredit lainnya selain kegiatan usaha sebagaimana nomor 1 sampai dengan nomor 4. Dalam hal, Bank Umum memiliki kegiatan usaha lainnya yang relevan sebagai fokus pemberian kredit, maka dapat dirinci pada bagian terpisah.
- 2) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total Kredit pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

d. Format Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

Sektor Ekonomi ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
RUPIAH								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan							
2.	Pertambangan dan Penggalian							
3.	Industri Pengolahan							
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin							
5.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi							
6.	Konstruksi							
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor							
8.	Pengangkutan dan Pergudangan							
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum							
10.	Informasi dan Komunikasi							
11.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi							
12.	Real Estat							
13.	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis							
14.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya							
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib							
16.	Pendidikan							
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial							
18.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi							
19.	Aktivitas Jasa Lainnya							
20.	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri							
21.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya							
22.	Rumah Tangga							
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya							

Sektor Ekonomi ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
VALUTA ASING								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan							
2.	Pertambangan dan Penggalian							
3.	Industri Pengolahan							
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin							
5.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi							
6.	Konstruksi							
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor							
8.	Pengangkutan dan Pergudangan							
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum							
10.	Informasi dan Komunikasi							
11.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi							
12.	Real Estat							
13.	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis							
14.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya							
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib							
16.	Pendidikan							
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial							
18.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi							
19.	Aktivitas Jasa Lainnya							
20.	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri							
21.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya							
22.	Rumah Tangga							
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya							
Jumlah								
JUMLAH RUPIAH + VALAS²⁾								

Keterangan:

- 1) Rincian sektor ekonomi mengacu pada daftar kode sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 2) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total Kredit pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

e. Format Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Jenis Penggunaan

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Pengguna	Aktual Sept T-1	Proyeksi						Des T+1	Des T+2
		Des T-1	T						
			Mar	Jun	Sep	Des			
RUPIAH									
A. Modal Kerja									
1. Ritel									
2. Korporasi									
3. Lainnya									
Total Kredit Modal Kerja									
B. Investasi									
1. Ritel									
2. Korporasi									
3. Lainnya									
Total Kredit Investasi									
C. Konsumsi									
1. Ritel									
2. Korporasi									
3. Lainnya									
Total Kredit Konsumsi									
TOTAL RUPIAH									
VALUTA ASING									
A. Modal Kerja									
1. Ritel									
2. Korporasi									
3. Lainnya									
Total Kredit Modal Kerja									
B. Investasi									
1. Ritel									
2. Korporasi									
3. Lainnya									
Total Kredit Investasi									
C. Konsumsi									
1. Ritel									
2. Korporasi									
3. Lainnya									
Total Kredit Konsumsi									
TOTAL VALUTA ASING									
JUMLAH RUPIAH + VALAS¹⁾									

Keterangan:

- 1) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total Kredit pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

- f. Format Rencana Pemberian Kredit berdasarkan Provinsi
(dalam jutaan rupiah)

Provinsi	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
1 Aceh								
2 Bali								
3 Banten								
4 Bengkulu								
5 DI Yogyakarta								
6 ...dst								
JUMLAH¹⁾								

Keterangan:

- 1) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total Kredit pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

g. Format Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam jutaan rupiah)

Sektor Ekonomi ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
A. USAHA MIKRO								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan							
2.	Pertambangan dan Penggalian							
3.	Industri Pengolahan							
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin							
5.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi							
6.	Konstruksi							
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor							
8.	Pengangkutan dan Pergudangan							
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum							
10.	Informasi dan Komunikasi							
11.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi							
12.	Real Estat							
13.	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis							
14.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya							
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib							
16.	Pendidikan							
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial							
18.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi							
19.	Aktivitas Jasa Lainnya							
20.	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri							
21.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya							
22.	Rumah Tangga							
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya							
Jumlah Kredit Usaha Mikro								

Sektor Ekonomi ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
B. USAHA KECIL								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan							
2.	Pertambangan dan Penggalian							
3.	Industri Pengolahan							
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin							
5.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi							
6.	Konstruksi							
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor							
8.	Pengangkutan dan Pergudangan							
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum							
10.	Informasi dan Komunikasi							
11.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi							
12.	Real Estat							
13.	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis							
14.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya							
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib							
16.	Pendidikan							
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial							
18.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi							
19.	Aktivitas Jasa Lainnya							
20.	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri							
21.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya							
22.	Rumah Tangga							
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya							
Jumlah Kredit Usaha Kecil								

Sektor Ekonomi ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
C. USAHA MENENGAH								
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan							
2.	Pertambangan dan Penggalian							
3.	Industri Pengolahan							
4.	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin							
5.	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi							
6.	Konstruksi							
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor							
8.	Pengangkutan dan Pergudangan							
9.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum							
10.	Informasi dan Komunikasi							
11.	Aktivitas Keuangan dan Asuransi							
12.	Real Estat							
13.	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis							
14.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya							
15.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib							
16.	Pendidikan							
17.	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial							
18.	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi							
19.	Aktivitas Jasa Lainnya							
20.	Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri							
21.	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya							
22.	Rumah Tangga							
23.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya							
Jumlah Kredit Usaha Menengah								
JUMLAH KREDIT USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH								

Keterangan:

- 1) Rincian sektor ekonomi mengacu pada sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai laporan bank umum terintegrasi.

h. Format Rencana Pemberian Kredit kepada UMKM berdasarkan Jenis Penggunaan

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Pengguna	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
RUPIAH								
A Modal Kerja								
1. Mikro								
2. Kecil								
3. Menengah								
Total Kredit Modal Kerja								
B Investasi								
1. Mikro								
2. Kecil								
3. Menengah								
Total Kredit Investasi								
TOTAL RUPIAH								
VALUTA ASING								
A Modal Kerja								
1. Mikro								
2. Kecil								
3. Menengah								
Total Kredit Modal Kerja								
B Investasi								
1. Mikro								
2. Kecil								
3. Menengah								
Total Kredit Investasi								
TOTAL VALUTA ASING								
JUMLAH RUPIAH + VALAS								

Jenis	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
B. VALUTA ASING								
1. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)								
2. Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)								
3. Surat Berharga Bank Indonesia (SBBi) dalam Valuta Asing								
4. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)								
5. Surat Perbendaharaan Negara Syariah								
6. Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank (SIMA)								
7. Promes / Aksep								
8. Wesel - Wesel Ekspor								
9. Wesel - Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)								
10. Wesel - Lainnya								
11. Surat Berharga Komersial								
12. <i>Medium Term Notes</i> (MTN)								
13. <i>Medium Term Notes</i> (MTN) Syariah								
14. <i>Floating Rate Notes</i> (FRN)								
15. <i>Credit Linked Notes</i>								
16. Reksadana								
17. Reksadana Syariah								
18. Reksadana Dana Pendapatan Tetap								
19. Obligasi dalam rangka program rekapitalisasi bank umum								
20. Obligasi Negara (ON)								
21. Obligasi Ritel Indonesia (ORI)								
22. Obligasi Korporasi - Subordinasi								
23. Obligasi Korporasi - Non Subordinasi								
24. Obligasi Lainnya								
25. Sukuk Bank Indonesia								
26. Sukuk Negara								
27. Sukuk Ritel								
28. Ijarah <i>Fixed Rate</i>								
29. Sukuk Korporasi - Subordinasi								
30. Sukuk Korporasi - Non Subordinasi								
31. <i>Project Based</i> Sukuk								
32. Sukuk Lainnya								
33. Dana Investasi <i>Real Estate</i> (DIRE)								
34. Efek Beragun Aset								
35. Efek Beragun Aset Syariah								
36. Surat Berharga Lainnya								
Total Valuta Asing								
JUMLAH RUPIAH DAN VALAS¹⁾								

Keterangan:

- 1) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total Surat Berharga yang Dimiliki pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

k. Format Rencana Penanaman Dana Lainnya

(dalam jutaan rupiah)

Jenis Penanaman Dana	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
1. ...								
2. ...								
3. ...								
dst.								
JUMLAH								

Keterangan:

Diisi dengan rencana penanaman dana selain yang sudah dicantumkan pada tabel a sampai tabel j.

8. Rencana Penyertaan Modal

Bagian ini mencerminkan posisi penyertaan modal posisi aktual (posisi akhir bulan September tahun penyusunan Rencana Bisnis) dan rencana penyertaan modal untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan yang paling sedikit meliputi bidang usaha, perkiraan jumlah dana yang akan ditanamkan, dan persentase kepemilikan termasuk aspek pengendalian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal.

Rencana penyertaan modal disusun dengan mengacu pada format berikut.

(dalam jutaan rupiah)

Nama Perusahaan	Tujuan Penyertaan ¹⁾	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
			Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
				Mar	Jun	Sep	Des		
1. ...									
2. ...									
3. ... dst.									
JUMLAH²⁾									

Keterangan:

- 1) Diisi berdasarkan tujuan penyertaan modal antara lain untuk investasi-penyertaan pada perusahaan anak, untuk investasi-penyertaan pada perusahaan asosiasi, dan untuk restrukturisasi kredit.
- 2) Jumlah pada baris ini harus sama dengan total Penyertaan Modal pada Proyeksi Laporan Posisi Keuangan (Neraca).

9. Rencana Permodalan

Bagian ini paling sedikit meliputi:

a. Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

Proyeksi KPMM paling sedikit meliputi proyeksi modal, proyeksi Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan proyeksi rasio KPMM untuk 3 (tiga) tahun mendatang.

Proyeksi tahun pertama disusun secara triwulanan sedangkan proyeksi tahun kedua dan tahun ketiga disusun secara tahunan (posisi akhir tahun).

Tata cara mengenai perhitungan KPMM mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

b. Rencana Perubahan Modal

Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal untuk 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan maupun jumlah modal.

Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (*existing shareholders*), rencana penawaran umum (*initial public offering*), hak memesan efek terlebih dahulu (*right issue*), penerbitan surat utang yang bersifat ekuitas, dan rencana penambahan modal lainnya, serta uraian mengenai rencana perubahan atau penggantian kepemilikan (jika ada).

Rencana permodalan disusun dengan mengacu pada format berikut.

Komponen Modal	Aktual Sept T-1	Proveksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO								
ATMR RISIKO KREDIT								
ATMR RISIKO PASAR								
ATMR RISIKO OPERASIONAL								
TOTAL ATMR								
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO								
ALOKASI PEMENUHAN KPMM								
Dari CET1 (%)								
Dari AT1 (%)								
Dari Tier 2 (%)								
RASIO KPMM								
Rasio CET1 (%)								
Rasio Tier 1 (%)								
Rasio Tier 2 (%)								
Rasio KPMM (%)								
CET 1 UNTUK BUFFER (%)								
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)								
<i>Capital Conservation Buffer (%)</i> ¹⁾								
<i>Countercyclical Buffer (%)</i> ²⁾								
<i>Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%)</i> ³⁾								

Keterangan:

- 1) Berlaku bagi Bank Umum yang diwajibkan untuk membentuk *capital conservation buffer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
- 2) Berlaku bagi Bank Umum yang diwajibkan untuk membentuk *countercyclical buffer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
- 3) Berlaku bagi Bank Umum yang diwajibkan untuk membentuk *capital surcharge* untuk bank sistemik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan bank sistemik dan *capital surcharge*.

2) Format Proyeksi Pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

(dalam jutaan rupiah)

Komponen Modal	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
1. Dana Usaha								
1.1 Dana Usaha								
1.2 Modal Disetor								
2. Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu yang dapat Diperhitungkan								
3. Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat Diperhitungkan								
4. Cadangan Umum								
5. Saldo Surplus Revaluasi Aset Tetap								
6. Pendapatan Komprehensif Lainnya : Potensi Keuntungan dari Peningkatan Nilai Wajar Aset Keuangan yang Diukur Pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain								
7. Cadangan Umum Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) atas Aset Produktif yang Wajib Dihitung (Paling Tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)								
8. Lainnya								
9. Faktor Pengurang Modal								
9.1 Pendapatan Komprehensif Lainnya								
9.1.1 Selisih Kurang karena Penjabaran Laporan Keuangan								
9.1.2 Potensi Kerugian dari Penurunan Nilai Wajar Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain								
9.2 Selisih Kurang antara PPKA dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Produktif								
9.3 Selisih Kurang Jumlah Penyesuaian Nilai Wajar dari Instrumen Keuangan dalam <i>Trading Book</i>								
9.4 PPKA Non Produktif								
9.5 Pajak Tangguhan								
9.6 <i>Goodwill</i>								
9.7 Seluruh Aset Tidak Berwujud Lainnya								
9.8 Kekurangan Modal pada Perusahaan Anak Asuransi								
9.9 Eksposur Sekuritisasi								
9.10 Penempatan Dana pada Instrumen AT 1 dan/atau <i>Tier 2</i> yang Diterbitkan oleh Bank Lain								
9.11 Kepemilikan Silang pada Entitas Lain yang Diperoleh Berdasarkan Peralihan karena Hukum, Hibah, atau Hibah Wasiat								
9.12 Lainnya								
10. Faktor Pengurang Modal-Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan <i>Settlement (Settlement Risk) Non Delivery Versus Payment</i>								
TOTAL MODAL								
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO								
ATMR RISIKO KREDIT								
ATMR RISIKO PASAR								
ATMR RISIKO OPERASIONAL								
TOTAL ATMR								
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO (%)								
RASIO KPMM (%)								
DANA USAHA UNTUK BUFFER (%)								
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK								
<i>Capital Conservation Buffer</i> ¹⁾								
<i>Countercyclical Buffer</i> ²⁾								
TOTAL CEMA								
Surat Berharga yang Diterbitkan Pemerintah								
Surat Berharga yang Diterbitkan Bank								
Surat Berharga yang Diterbitkan Korporasi Berbadan Hukum Indonesia								

Keterangan:

- 1) Berlaku bagi Bank Umum yang diwajibkan untuk membentuk *capital conservation buffer* sebagaimana

diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

- 2) Berlaku bagi Bank Umum yang diwajibkan untuk membentuk *countercyclical buffer* sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

b. Format Rencana Perubahan Modal

(dalam jutaan rupiah)

Nama Komponen	Aktual Sept T-1	Proyeksi						
		Des T-1	T				Des T+1	Des T+2
			Mar	Jun	Sep	Des		
POSISI MODAL								
Pemegang Saham ¹⁾								
1 _____								
2 _____								
3 _____								
4 _____								
.... dst.								
Total Modal Disetor								
IPO (<i>Initial Public Offering</i>) - <i>Go Public</i>								
<i>Right Issues</i>								
Lainnya (Instrumen Modal dalam bentuk Saham atau Lainnya yang memenuhi persyaratan)								
Total								

Keterangan:

- 1) Diisi dengan keterangan nama masing-masing pemegang saham.

10. Rencana Pengembangan Organisasi dan SDM

Bagian ini menguraikan informasi mengenai struktur organisasi dan kondisi SDM terkini, rencana pengembangan organisasi dan SDM yang sedang berlangsung, maupun rencana pengembangan terkait SDM lainnya paling sedikit untuk 1 (satu) tahun ke depan yang antara lain memuat:

a. Rencana Pengembangan Organisasi

Rencana pengembangan organisasi antara lain mencakup rencana pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan kemampuan, ukuran, dan kompleksitas usaha Bank Umum.

b. Rencana Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Rencana pengembangan sistem informasi manajemen antara lain mencakup pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi untuk manajemen dan rencana pengembangan sistem akuntansi, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk rencana pengembangan tersebut.

c. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rencana pengembangan SDM antara lain rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya atau anggaran pendidikan dan pelatihan baik untuk pegawai, Direksi, dan Komisaris Bank Umum, serta rencana pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat tertentu.

d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing

Rencana pemanfaatan tenaga kerja asing antara lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.

Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing disusun dengan mengacu pada format berikut.

No.	Bidang Tugas dan Posisi		Jumlah	Nama TKA	Jangka Waktu	Nama Tenaga Pendamping	Rencana Program Alih Pengetahuan
	Posisi Jabatan	Ruang Lingkup					
1	Komisaris						
2	Direksi						
3	Pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri						
4	Pemimpin Kantor Perwakilan						
5	Pejabat Eksekutif						
6	Tenaga Ahli/ Konsultan						
7	Jabatan Lainnya ¹⁾						
Alasan pemanfaatan TKA serta alasan tidak/belum menggunakan Tenaga Kerja Indonesia: a..... b..... dst.....							

Keterangan:

1) jika ada, sesuai persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

e. Rencana Penggunaan Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*)

Rencana penggunaan tenaga alih daya (*outsourcing*) antara lain mencakup rencana jumlah yang akan digunakan dan rencana penempatan tenaga alih daya (*outsourcing*).

Penggunaan tenaga alih daya (*outsourcing*) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain.

11. Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru
Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru merupakan uraian mengenai rencana penyelenggaraan produk bank yang memenuhi definisi produk bank baru sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum serta penyelenggaraan produk bank umum. Bagian ini memuat fokus pengembangan dan hasil analisis dalam penyelenggaraan produk bank baru untuk 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru paling sedikit mencakup:

a. Fokus Pengembangan

Fokus pengembangan mencakup rencana yang bersifat menyeluruh mengenai fokus arah pengembangan yang sejalan dengan strategi Bank Umum, paling sedikit meliputi aspek-aspek yang melatarbelakangi dan/atau yang menjadi pertimbangan dan tujuan untuk merencanakan penyelenggaraan produk bank baru.

b. Hasil Analisis Secara Keseluruhan

Hasil analisis secara keseluruhan paling sedikit mencakup:

- 1) analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman;
- 2) analisis manfaat dan biaya; dan
- 3) hal-hal yang masih perlu disesuaikan oleh Bank Umum, termasuk dari sisi manajemen risiko,

sehubungan dengan rencana penyelenggaraan produk baru.

Rincian analisis untuk masing-masing produk dapat disampaikan pada saat pengajuan produk baru. Dalam hal Bank Umum telah melakukan analisis lainnya, hasil analisis dimaksud juga dapat dicantumkan.

Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan Aktivitas Baru disusun dengan mengacu pada format berikut.

Format Rencana Penerbitan Produk dan/atau Pelaksanaan
Aktivitas Baru

<p>a. Fokus Pengembangan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>b. Hasil Analisis Secara Keseluruhan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

12. Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.

Pengertian jaringan kantor serta cakupan jaringan kantor yang dilaporkan dalam rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum.

Informasi yang dimuat dalam rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi informasi mengenai kantor induk, rencana waktu pelaksanaan, perkiraan investasi atau biaya, lokasi, dan keterangan lainnya.

Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor disusun dengan mengacu pada format berikut.

No	Informasi ¹⁾	Jaringan Kantor		Kantor Induk ⁴⁾	Rencana Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Investasi/ Biaya (dalam Rupiah)	Lokasi			Keterangan ⁵⁾
		Status Kantor ²⁾	Sandi Kantor ³⁾				Alamat	Kota	Provinsi	
1.										
2.										
3.										
dst										

Keterangan:

- 1) Diisi dengan informasi pembukaan, perubahan status, perpindahan alamat dan/atau penutupan jaringan kantor.
- 2) Diisi dengan status kantor yang dilaporkan dalam Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum.
- 3) Diisi dengan sandi kantor Bank Umum. Tata cara pengisian mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Kantor induk merupakan kantor/unit organisasi sebagai penyelia dari jaringan kantor tersebut. Tata cara pengisian mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Keterangan lebih rinci dapat dilampirkan dalam bagian terpisah.

13. Informasi Lainnya

Informasi lainnya memuat rencana-rencana lain yang perlu diuraikan (jika ada) namun tidak termasuk dalam cakupan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan pada angka 1 sampai dengan angka 12, antara lain:

- a. langkah-langkah penyelesaian kredit yang bermasalah termasuk AYDA. Pengertian AYDA mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum;
- b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank Umum;
- c. *linkage program*;
- d. pengembangan pelayanan Bank Umum yang mencakup antara lain:
 - 1) informasi rencana pengembangan sarana atau media informasi kepada nasabah;
 - 2) rencana pengembangan sarana elektronik untuk kebutuhan nasabah;
 - 3) rencana upaya perlindungan nasabah, antara lain rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat; dan/atau
- e. informasi lain yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau diperlukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

II. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

Laporan Realisasi Rencana Bisnis paling sedikit mencakup:

1. Informasi Realisasi Rencana Bisnis dan Tindak Lanjut

Informasi Realisasi Rencana Bisnis dan Tindak Lanjut mencakup antara lain:

- a. penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya;
- b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi; dan
- c. tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis;

2. Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu; dan

3. Informasi Lainnya

Informasi Lainnya berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada angka 1 dan angka 2, antara lain:

- a. Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum; dan
- b. Laporan Realisasi Tenaga Kerja Asing yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.

Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara umum disusun dengan mengacu pada format berikut.

1. Format Informasi Realisasi Rencana Bisnis dan Tindak Lanjut

<p>a. Penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya¹⁾</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>b. Penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>c. Tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

Keterangan:

1) Perbandingan Rencana Bisnis dengan realisasi selain mencakup Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu, Bank Umum perlu juga menjelaskan besaran realisasi yang terkait dengan proyeksi keuangan, penghimpunan dana, penyaluran dana dan rencana permodalan yang belum tercakup dalam tabel tersebut.

2. Format Laporan Realisasi Rasio Keuangan dan Pos-pos Tertentu

No.	Rasio-Rasio	Target	Realisasi	Deviasi	Keterangan
A. RASIO KEUANGAN					
1.	Rasio KPMM ¹⁾				
2.	Rasio Modal Inti terhadap ATMR ²⁾				
3.	Rasio Modal Inti Utama terhadap ATMR ⁶⁾				
4.	Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap ⁶⁾				
5.	Rasio Modal Inti terhadap Total Aset ²⁾				
6.	ROE ¹⁾				
7.	ROA ¹⁾				
8.	NIM ¹⁾				
9.	Rasio Beban <i>Overhead</i> terhadap Pendapatan Bersih Kegiatan Utama ²⁾				
10.	BOPO ¹⁾				
11.	Rasio <i>Fee Based Income</i> terhadap Total Pendapatan Operasional ²⁾				
12.	Laba (Rugi) Operasional				
13.	Laba (Rugi) Tahun Berjalan				
14.	Rasio Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif ¹⁾				
15.	Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif ¹⁾				
16.	Rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif ¹⁾				
17.	Rasio CKPN Aset Produktif terhadap Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) yang Wajib Dihitung Atas Aset Produktif ²⁾				
18.	Rasio NPL (kepada pihak ketiga Non-Bank)				
	a. <i>Gross</i> ¹⁾				
	b. <i>Net</i> ¹⁾				
19.	Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif ²⁾				
20.	Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit ²⁾				
21.	Rasio Agunan Yang Diambil Alih terhadap Total kredit				
22.	Kredit yang diberikan				
	a. Rupiah				
	b. Valuta Asing				
23.	Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik				
	a. <i>Committed</i>				
	1) Rupiah				
	2) Valuta Asing				
	b. <i>Uncommitted</i>				
	1) Rupiah				
	2) Valuta Asing				
24.	Rasio Aset yang diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi terhadap total aset ²⁾				
25.	Rasio Spot dan Derivatif terhadap Total Aset ²⁾				
26.	Rasio Aset Likuid terhadap Total Aset ²⁾				
27.	Rasio Aset Likuid terhadap Pendanaan Jangka Pendek ²⁾				
28.	Rasio Deposan Inti terhadap Total Dana Pihak Ketiga ²⁾				

No.	Rasio-Rasio	Target	Realisasi	Deviasi	Keterangan
29.	<i>Cost to Income Ratio (CIR)</i> ³⁾				
30.	<i>Loan to Deposit Ratio (LDR)</i> ¹⁾				
31.	Dana Pihak Ketiga				
	a. Rupiah				
	b. Valuta Asing				
B. RASIO-RASIO TERTENTU LAINNYA					
1.	Rasio Total Kredit kepada Usaha Mikro terhadap Total Kredit kepada UMKM				
2.	Rasio Total Kredit kepada Usaha Kecil terhadap Total Kredit kepada UMKM				
3.	Rasio Total Kredit kepada Usaha Menengah terhadap Total Kredit kepada UMKM				
4.	Rasio Total Kredit kepada UMKM terhadap Total Kredit				
5.	a. Rasio Dana Pendidikan dan Latihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran SDM ⁴⁾				
	b. Rasio Sisa Anggaran Tahun ini yang digunakan untuk tahun berikutnya ⁵⁾				
6.	Rasio Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal				

Keterangan:

- 1) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional.
- 2) Formula dan perhitungan rasio-rasio keuangan berpedoman pada penjelasan rasio keuangan pokok dan pos-pos tertentu sebagaimana butir I.5.b.
- 3) Formula dan perhitungan rasio ini berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional. Rasio ini baru akan diperhitungkan dan dilaporkan untuk Laporan Realisasi Rencana Bisnis tahun 2022.
- 4) Cakupan dana pendidikan dan latihan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyediaan dana untuk pengembangan sumber daya manusia bank umum.
- 5) Yang dimaksud dengan sisa anggaran adalah selisih antara dana yang wajib disediakan dengan realisasinya.
- 6) Hanya diisi bagi Bank Umum selain kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

3. Format Laporan Realisasi Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor

No	Nama Kantor	Informasi ¹⁾	Status Kantor ²⁾	Sandi Kantor ³⁾	Kantor Induk ⁴⁾	Tanggal Realisasi	Lokasi	Keterangan ⁵⁾
1.								
2.								
3.								
dst.								

Keterangan:

- 1) Diisi dengan informasi pembukaan, perubahan status, perpindahan alamat dan/atau penutupan jaringan kantor.
- 2) Diisi dengan status kantor yang dilaporkan dalam Rencana Bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bank umum.
- 3) Diisi dengan sandi kantor Bank Umum. Tata cara pengisian mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Kantor induk merupakan kantor/unit organisasi sebagai penyelia dari jaringan kantor tersebut. Tata cara pengisian mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5) Keterangan lebih rinci dapat dilampirkan dalam bagian terpisah.

4. Format Laporan Realisasi Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan kepada Tenaga Pendamping

No.	Nama TKA	Bidang Tugas	Posisi/ Jabatan		Nama Pendamping	Hasil Evaluasi Terhadap Pendamping	Pendidikan/ Pelatihan kepada Pendamping	Lembaga Pelaksana	Keterangan
			TKA	Pendamping					
1					1 2				
2					1 2				
dst.					dst.				

5. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Alih Pengetahuan oleh Tenaga Kerja Asing

No.	Nama TKA	Waktu Pelatihan/ Pengajaran	Lokasi Pelatihan/ Pengajaran	Jumlah Peserta	Jangka Waktu	Materi/ Topik
1		1 2				
2		1 2				
dst.		dst.				

Keterangan:

- a. Mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan.
- b. Disertai lampiran foto-foto kegiatan pelatihan.

III. PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS
Sesuai POJK RBB, Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Cakupan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun oleh Dewan Komisaris paling sedikit meliputi penilaian mengenai:

1. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis;
2. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank Umum secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), serta profil risiko Bank Umum terutama risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan tata kelola yang baik; dan
3. upaya memperbaiki kinerja Bank Umum, dalam hal dari hasil penilaian sebagaimana pada angka 2 terjadi penurunan kinerja.

Penilaian Dewan Komisaris pada angka 1 sampai dengan angka 3 dapat dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Umum.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disusun dengan mengacu pada format berikut.

Format Laporan Pengawasan Rencana Bisnis

- a. Penilaian Komisaris tentang pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis

.....
.....
.....
.....
.....
.....

- b. Penilaian Komisaris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja secara umum, khususnya terkait faktor permodalan (*capital*), rentabilitas (*earnings*), profil risiko terutama risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan tata kelola yang baik

.....
.....
.....
.....
.....

- c. Penilaian Komisaris mengenai upaya memperbaiki kinerja Bank Umum, dalam hal menurut penilaian yang bersangkutan kinerja Bank Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas terdapat penurunan

.....
.....
.....
.....
.....

Keterangan:

Penilaian Komisaris pada huruf a sampai dengan huruf c dapat dilengkapi pula dengan penilaian yang bersangkutan mengenai faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank Umum.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja